

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Deforestasi menurut Perpres Nomor 16 Tahun 2013 diartikan sebagai perubahan secara permanen areal perhutanan menjadi tidak berhutan.¹ Deforestasi menjadi isu global dengan skala luas penyebab dan dampaknya yang bersifat transnasional. Dalam kolaborasi World Research Institute dan Google DeepMind pada tahun 2025, dihasilkan data berkurangnya 515 juta hektar tutupan hutan global, yang 60% di antaranya disebabkan oleh aktivitas manusia, seperti penebangan, pembukaan lahan perkebunan, dan pembukaan lahan hunian.² Berdasarkan data tersebut, tingginya angka deforestasi memberikan dampak permanen terhadap berkurangnya stok karbon, gangguan habitat alam, dan hilangnya berbagai ekosistem.

Laju deforestasi global dapat dilihat dari data Global Forest Resources Assessment (FRA) yang dirilis setiap lima tahun. FRA 2025 menunjukkan bahwa sepertiga daratan dunia atau 4,14 miliar hektar lahan terdiri atas lahan hutan.³ Laporan tersebut menunjukkan turunnya laju deforestasi global dari periode 1990-2000 sebesar 17,6 juta hektar hutan pertahun, menjadi 10,9 juta hektar pertahun pada periode 2015-2025.

¹ "PERPRES No. 62 Tahun 2013," JDIH BPK, diakses 9 November 2025, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/41432/perpres-no-62-tahun-2013>.

² Michelle Sims dkk., "New Data Shows What's Driving Forest Loss Around the World," 12 Juni 2025, <https://www.wri.org/insights/forest-loss-drivers-data-trends>.

³ Food and Agricultural Organization of the United Nations, "Global Deforestation Slows, but Forests Remain under Pressure, FAO Report Shows," Newsroom, diakses 9 November 2025, <https://www.fao.org/newsroom/detail/global-deforestation-slows--but-forests-remain-under-pressure--fao-report-shows/en>.

Dalam menghadapi isu krisis iklim, khususnya deforestasi, Indonesia sebagai salah satu negara yang masih memiliki hutan hujan tropis mencanangkan Forest and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 yang secara garis besar berfokus pada pengurangan–pencegahan deforestasi, restorasi dan rehabilitasi lahan hutan, serta konservasi dan pengelolaan lahan yang tersisa.⁴ Pendekatan FOLU Net Sink 2030 dilakukan sebagai upaya Indonesia memenuhi kewajiban atas Perjanjian Paris untuk mencapai *net zero emission* pada tahun 2060. Pemerintah Indonesia menunjukkan optimismenya terhadap dunia internasional untuk mencapai *net zero emission* dengan kontribusi FOLU Net Sink 2030 diproyeksikan berperan 60% penurunan emisi gas rumah kaca.

Indonesia sukses menekan deforestasi pada periode 2017-2021 dengan peraturan tegas yang dihasilkan terkait industri kelapa sawit hingga penanganan kebakaran hutan. Namun, pencapaian tersebut tidak didukung konsistensi kebijakan politik. Dalam perkembangannya, pemerintah Indonesia mempermudah pembukaan lahan hutan untuk kepentingan industri. Pemerintah Indonesia dinilai menunjukkan ambisi ramah lingkungannya di kancah internasional, tetapi justru menjalankan kebijakan tidak ramah lingkungan di kancah domestik melalui berbagai program seperti wacana ketahanan pangan dan ketahanan energi.⁵ Pemerintah Indonesia secara aktif terlibat dalam berbagai kegiatan ekstraktif, termasuk pembukaan dua juta hektar lahan di Merauke, Papua untuk proyek PSN.⁶

⁴ Muhamad Iqbal, *Mengenal Apa Itu FOLU Net Sink 2030*, Emisi Karbon, 5 Oktober 2023, 86, <https://lindungihutan.com/blog/apa-itu-folu-net-sink/>.

⁵ Auriga Nusantara, “Global Deforestation Surges Alarming: Indonesia at a Crossroads Between Green Commitments and Short-Term Economic,” diakses 22 Oktober 2025, https://auriga.or.id/press_release/detail/61/global-deforestation-surges-alarming-.

⁶ AMAN, “Masyarakat Adat di Papua Selatan Menderita Akibat Proyek Strategis Nasional,” diakses 9 November 2025, <https://www.aman.or.id/news/read/1884>.

Di wilayah Papua, deforestasi menjadi persoalan serius, terlebih dengan peran hutan sebagai sumber kehidupan bagi banyak kelompok masyarakat adat. Forest Watch Indonesia pada tahun 2023 menyebutkan Papua memiliki 33,12 juta hektar lahan hutan, atau setara dengan 32,2% hutan Indonesia.⁷ Namun, luas lahan hutan tersebut mengalami penurunan selama beberapa dekade terakhir. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Global Forest Watch, Papua kehilangan 770kha tutupan pohon selama dua dekade terakhir, dengan luas kehilangan tutupan pohon terbesar terjadi di Merauke, wilayah yang dijadikan wilayah PSN oleh pemerintah Indonesia.⁸

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kehutanan (dahulu KLHK) menempatkan Papua sebagai salah satu dari tiga pulau prioritas dalam kebijakan *Forest and Other Land Uses (FOLU) Net Sink 2030*, sebuah komitmen penurunan emisi yang diturunkan dari *enhanced Nationally Determined Contribution (NDC)* Indonesia dalam kerangka *UNFCCC*.⁹ Pemerintah Indonesia juga mengklaim keberhasilan menekan laju deforestasi nasional ke titik terendah sepanjang sejarah pencatatan pada periode 2021-2022, sebagaimana disampaikan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari KLHK.¹⁰

Di sisi lain, pemerintah secara aktif merespons kritik internasional terkait kondisi hutan Papua. Ketika NASA merilis citra satelit pada 2021 yang menyoroti

⁷ “Hutan Papua dan Kalimantan Alami Deforestasi yang Tinggi,” Forest Watch Indonesia, diakses 7 Januari 2026, <https://fwi.or.id/hutan-papua-dan-kalimantan-alami-deforestasi-yang-tinggi/>.

⁸ Global Forest Watch, “Papua, Indonesia Deforestation Rates & Statistics,” diakses 6 Januari 2026, <https://www.globalforestwatch.org/dashboards/country/IDN/23?category=undefined>.

⁹ Hana Nushratu, “KLHK Tetapkan 3 Pulau Prioritas buat Kejar Indonesia’s FOLU Net Sink 2030,” detiknews, 21 Juni 2024, <https://news.detik.com/berita/d-7400914/klhk-tetapkan-3-pulau-prioritas-buat-kejar-indonesias-folu-net-sink-2030>.

¹⁰ Raden Ariyo Wicaksono, “Klaim Deforestasi KLHK: Di Titik Terendah Atau Beda Cara Hitung?,” Betahita, 20 Februari 2024, <https://www.betahita.id/berita/9915/klaim-deforestasi-klhk-di-titik-terendah-atau-beda-cara-hitung>.

perubahan tutupan hutan di wilayah tersebut, KLHK menerbitkan bantahan resmi yang menyebut citra itu merepresentasikan izin konsesi lama era pemerintahan sebelumnya, bukan laju deforestasi yang sedang berlangsung.¹¹ Pola serupa muncul di forum internasional, ketika Utusan Khusus Presiden, Hashim Djojohadikusumo, membantah tuduhan deforestasi besar-besaran dalam proyek *food estate* Merauke dengan alasan sebagian besar lahan yang dibuka berupa savana atau lahan kosong.¹²

Kondisi di lapangan menunjukkan gambaran yang kontras dengan narasi komitmen atau pernyataan Pemerintah. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2023, berlandaskan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020, justru menetapkan Kawasan Pengembangan Pangan dan Energi Merauke sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan luas area yang direncanakan mencapai lebih dari dua juta hektare kawasan hutan.¹³ Pada akhir tahun 2024 sendiri, lebih dari 11 ribu ha hutan mengalami deforestasi dan diperkirakan akan terus meningkat, terlebih dengan target Pemerintah Indonesia untuk membuka 1 juta hektar lahan untuk padi dan tebu (PSN).¹⁴

Greenpeace sebagai kelompok aktivis berfokus di bidang lingkungan dan HAM dengan mengedepankan prinsip *No Deforestation, No Peat, No Exploitation* (NDPE). Dengan prinsip tersebut, Greenpeace termasuk dalam NGO yang aktif

¹¹ SIEJ, "NASA Merilis Foto Deforestasi Papua. KLHK Mengkonfirmasi Pembukaan Hutan oleh Perkebunan Kelapa Sawit.," SIEJ, 21 November 2021, <https://siej.or.id/index.php/id/ekuatorial/nasa-merilis-foto-deforestasi-papua-klhk-mengkonfirmasi-pembukaan-hutan-oleh-perkebunan>.

¹² Han Revanda Putra, "Hashim Bantah Deforestasi Besar-besaran di Food Estate Papua: 60 Persen Lahan Kosong," Tempo, 12 Februari 2024, <https://www.tempo.co/ekonomi/hashim-bantah-deforestasi-besar-besaran-di-food-estate-papua-60-persen-lahan-kosong-1175983>.

¹³ Aryo Bhawono, "Merauke Menolak Babak Belur Karena Food Estate," Betahita, 17 Oktober 2024, <https://www.betahita.id/berita/10633/merauke-menolak-babak-belur-karena-food-estate>.

¹⁴ Ayu Purwaningsih, "Megaprojek Papua: Perut Kenyang, Hutan Tinggal Kenangan? – DW – 23.04.2025," Deutsche Welle, diakses 7 Januari 2026, <https://www.dw.com/id/megaprojek-pangan-papua-jadi-ancaman-deforestasi-terbesar-di-dunia/a-72310113>.

mengadvokasikan deforestasi di Papua melalui publikasi hingga konfrontasi langsung dengan aktor yang terlibat dalam deforestasi.¹⁵ Greenpeace mulai menjalankan kampanyenya di Papua sejak tahun 2005 dengan menyasar pelaku *illegal logging*, perusahaan transnasional, dan pemerintah Indonesia.¹⁶ Greenpeace berupaya menarik dukungan publik atas isu hutan hujan Papua melalui aksi-aksinya.¹⁷ Greenpeace secara aktif juga berupaya menekan kebijakan hukum hukum Indonesia, seperti moratorium hutan di Papua yang tidak memiliki kriteria jelas sehingga tumpang tindih dengan area hutan adat.¹⁸

Greenpeace sebagai bagian dari aktor aktivisme transnasional berupaya melakukan perannya melalui berbagai medium, seperti publikasi, diskusi publik, aksi damai, hingga desakan terhadap pemerintah Indonesia dan perusahaan ekstraktif dari sisi hukum terkait kegiatan ekstraktif di Papua.¹⁹ Sebagai contoh, pada tahun 2017 Greenpeace melakukan kerja sama dengan masyarakat adat di desa Manggroholo dan Sira. Melalui kerja sama ini, Greenpeace berupaya menekan pemerintah Indonesia sehingga menerbitkan Surat Keputusan Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) untuk hutan desa pertama di tanah Papua, tepatnya di Kampung Manggroholo dan Sira.²⁰ Contoh lainnya dapat dilihat pada tahun 2025,

¹⁵ Muhammad Arief Virgy dkk., "Strategi Jaringan Advokasi Transnasional Greenpeace Indonesia Terkait Isu Deforestasi Hutan Indonesia oleh Wilmar International," *Journal of Political Issues* 1, no. 2 (2020): 74–91, <https://doi.org/10.33019/jpi.v1i2.9>.

¹⁶ Greenpeace, *Down to Zero: How Greenpeace is Ending Deforestation in Indonesia 2003-2013 and Beyond* (Greenpeace Southeast Asia - Indonesia, 2013).

¹⁷ Nico Wamafma, "Industri Sawit Rampas Hutan dan Ruang Hidup Masyarakat Adat Papua - Greenpeace Indonesia - Greenpeace Indonesia," diakses 22 Maret 2025, <https://www.greenpeace.org/indonesia/cerita/4840/industri-sawit-rampas-hutan-dan-ruang-hidup-masyarakat-adat-papua/>.

¹⁸ Greenpeace Indonesia, *Briefer - Indonesia: Deforestasi Meningkat di Area-Area yang dilindungi oleh Moratorium - Greenpeace Indonesia*, 8 Agustus 2019, <https://www.greenpeace.org/indonesia/publikasi/3491/indonesia-deforestasi-meningkat-di-area-area-yang-dilindungi-oleh-moratorium/>.

¹⁹ Greenpeace Indonesia, *Stop Baku Tipu: Sisi Gelap Perizinan di Tanah Papua* (2021).

²⁰ Greenpeace Indonesia, *Hutan Desa Pertama di Papua Satu Dekade Berjuang Melindungi Hutan dari Tekanan Deforestasi - Greenpeace Indonesia*, 9 Maret 2017,

ketika Greenpeace menjalankan kampanye #SaveRajaAmpat yang kemudian berdampak pada dicabutnya izin empat aktivitas tambang di Raja Ampat yang menjadi *concern* Greenpeace.²¹

1.2 Rumusan Masalah

Komitmen Indonesia dalam forum internasional untuk menekan laju deforestasi, sebagaimana tercermin dalam kebijakan *Forest and Other Land Use* (FOLU) *Net Sink* 2030 dan *enhanced Nationally Determined Contribution* (NDC), tidak sejalan dengan praktik tata kelola hutan di tingkat domestik. Ketimpangan ini tampak jelas di Papua, tempat pemerintah menetapkan proyek ekstraktif berskala besar seperti Proyek Strategis Nasional (PSN) Merauke di atas kawasan hutan yang sama dengan yang diklaim masuk program konservasi. Respons pemerintah Indonesia terhadap data deforestasi, seperti melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) atas citra satelit NASA dan pernyataan Utusan Khusus Presiden terkait food estate Merauke, memperlihatkan inkonsistensi kebijakan di lapangan. Kondisi tata kelola yang tidak konsisten ini membuka ruang bagi aktor non-negara, salah satunya Greenpeace, untuk terus memainkan peran pengawasan dan tekanan terhadap pemerintah maupun aktor korporasi yang terlibat dalam deforestasi Papua, melalui gerakan aktivisme transnasional dalam berbagai jalur aktivisme.

<https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/2320/hutan-desa-pertama-di-papua-satu-dekade-berjuang-melindungi-hutan-dari-tekanan-deforestasi/>.

²¹ Sapariah Saturi, “Cabut 4 Izin Tambang Nikel Raja Ampat dan Ancaman Hukum, Bagaimana Pulau Lain?,” *Environmental News, Mongabay.co.id*, 11 Juni 2025, <https://mongabay.co.id/2025/06/11/cabut-4-izin-tambang-nikel-raja-ampat-dan-ancaman-hukum-bagaimana-pulau-lain/>.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut pertanyaan penelitian yang dapat ditarik adalah bagaimana upaya Greenpeace untuk mendorong tata kelola hutan hujan Papua melalui jalur-jalur aktivisme transnasional.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan upaya Greenpeace dalam isu deforestasi hutan hujan di Papua.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan studi Hubungan Internasional bagi mahasiswa, khususnya di bidang lingkungan dan aktivisme transnasional.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi jaringan advokasi dan kelompok sipil dalam menerapkan metode kampanye yang digunakan Greenpeace untuk mengangkat agenda perlindungan hutan ke level internasional, khususnya terkait hutan hujan Papua.

1.6 Studi Pustaka

Dalam menjawab pertanyaan penelitian, penulis memanfaatkan sejumlah referensi yang relevan dengan topik kajian dan berkontribusi dalam pengembangan penelitian ini. Adapun sumber-sumber yang digunakan sebagai rujukan utama dalam penelitian ini meliputi:

Pertama, penulis merujuk tulisan dengan judul *Indigenous Peoples, Environmental Groups, Networks and the Political Economy of Rainforest Destruction in Brazil* karya David E. Toohey. Dalam tulisannya, Toohey membahas

deforestasi hutan hujan Amazon dalam kerangka *political economy* dan konflik ekologis yang bersifat asimetris, yakni ketimpangan kekuasaan antara negara, korporasi, dan masyarakat adat.²² Dalam konteks ini, masyarakat adat berada di posisi paling terdampak namun memiliki daya tawar politik yang lemah. Toohey menyoroti pentingnya jaringan transnasional yang melibatkan kelompok lingkungan internasional untuk melawan ketimpangan dan menekan praktik eksploitasi hutan hujan berskala global melalui mobilisasi opini publik internasional, mendorong tekanan politik, serta mempengaruhi pola konsumsi dan kebijakan negara.

Penulis menjadikan tulisan Toohey sebagai salah satu referensi yang dapat membantu memahami peran aktor non-negara dalam membangun jaringan lintas batas guna mengangkat isu lokal ke tingkat internasional. Dengan melihat studi kasus hutan hujan di Brasil yang diangkat oleh Toohey, penulis dapat melihat peranan *environmental groups* dalam konflik ekologi. Artikel ini membantu penulis memahami bagaimana kampanye Greenpeace dapat berkontribusi pada internasionalisasi isu deforestasi Papua, khususnya dalam menghadapi relasi kuasa yang timpang antara masyarakat adat, negara, dan kepentingan ekonomi global.

Kedua, penulis merujuk karya Zajak yang berjudul *Rethinking Pathways of Transnational Activism*. Dalam penelitian ini, Zajak mengembangkan kerangka konseptual untuk memahami aktivisme transnasional sebagai proses yang berjalan melalui jalur-jalur strategis yang berbeda. Zajak mengkritik pendekatan sebelumnya yang cenderung melihat advokasi transnasional secara tunggal atau

²² David E. Toohey, "Indigenous Peoples, Environmental Groups, Networks and the Political Economy of Rainforest Destruction in Brazil," *International Journal of Peace Studies* 17, no. 1 (2012): 73–97.

linear, seperti melalui jejaring semata. Zajak mengidentifikasi empat jalur utama dalam aktivisme transnasional, yaitu *international-organizational pathway*, *bilateral pathway*, *market pathway*, dan *civil society pathway*.²³ Keempat jalur tersebut merepresentasikan arena dan target advokasi yang berbeda. Jalur-jalur ini tidak bersifat eksklusif, melainkan dapat berjalan secara paralel dan saling melengkapi tergantung pada konteks politik, ekonomi, dan sosial yang dihadapi aktor advokasi.

Artikel ini berperan penting dalam kerangka analisis yang berfokus pada proses dan jalur advokasi. Konsep *pathways of transnational activism* memungkinkan penelitian ini untuk mengkaji bagaimana kampanye Greenpeace dijalankan melalui berbagai arena, seperti tekanan terhadap institusi politik, aktor ekonomi, serta pembentukan opini publik internasional. Dengan menggunakan kerangka Zajak, alur kampanye Greenpeace tidak hanya dipahami sebagai strategi tunggal, tetapi sebagai rangkaian jalur advokasi yang dinamis dan saling terkait. Kerangka ini membantu menjelaskan bagaimana Greenpeace menyesuaikan kampanyenya dalam konteks advokasi transnasional isu deforestasi hutan Papua.

Ketiga, penulis merujuk karya Sorce dan Dumitrica yang berjudul *Transnational Dimensions in Digital Activism and Protest* membahas bagaimana aktivisme dan protes di era digital berkembang melampaui batas negara melalui jaringan komunikasi global. Artikel ini menekankan keterkaitan antara level global dan lokal dalam aktivisme digital, serta menolak pandangan bahwa aktivisme

²³ Sabrina Zajak, "Rethinking Pathways of Transnational Activism," *Global Society* 31, no. 1 (2017): 125–43, <https://doi.org/10.1080/13600826.2016.1235549>.

semata-mata berpindah dari ruang fisik ke ruang digital tanpa konteks.²⁴ Penulis menunjukkan bahwa peredaran isu lintas negara, seperti #MeToo dan Black Lives Matter, terjadi melalui kombinasi teknologi digital, jaringan aktivis yang sudah ada, dan mobilisasi warga. Selain itu, artikel ini memberikan pandangan dalam melihat aktivisme transnasional sebagai *entanglement* antara arus informasi, hierarki kekuasaan, dan agensi aktor.

Artikel ini relevan bagi peneliti dengan pemahaman tentang jalur aktivisme transnasional dalam membentuk dan menyebarkan kampanye advokasi lintas negara. Perspektif Sorce dan Dumitrica membantu menjelaskan bagaimana kampanye Greenpeace tidak hanya beroperasi pada level institusional, tetapi juga melalui ruang publik digital yang menghubungkan audiens global dengan isu lokal Papua. Kerangka ini memperkuat analisis alur kampanye dengan menempatkan komunikasi digital sebagai bagian dari jalur *civil society path* dalam advokasi transnasional. Dengan demikian, artikel ini mendukung penelitian dalam memahami dimensi transnasional kampanye Greenpeace sebagai proses yang bersifat lintas jaringan, kontekstual, dan dinamis.

Keempat, penulis merujuk karya Najamuddin Khairur Rijal dan Uswatun Hasanah yang berjudul *Global civil society vis-a-vis state and corporation: The challenges of Greenpeace in reducing deforestation in Brazil*. Karya ini menekankan bahwa meningkatnya deforestasi tidak hanya disebabkan oleh aktivitas korporasi, tetapi juga oleh kebijakan negara yang pro-pembangunan dan pro-deforestasi, khususnya pada masa pemerintahan Jair Bolsonaro. Greenpeace

²⁴ Giuliana Sorce dan Delia Dumitrica, "Transnational Dimensions in Digital Activism and Protest," *Review of Communication* 22, no. 3 (2022): 157–74, <https://doi.org/10.1080/15358593.2022.2107877>.

diposisikan berhadapan langsung dengan koalisi negara dan korporasi, di mana negara memiliki kekuatan politik dan korporasi memiliki kekuatan ekonomi yang saling menopang. Rijal dan Hasanah dalam penelitiannya menunjukkan bahwa meskipun Greenpeace telah melakukan berbagai upaya seperti kampanye, petisi, dan kerja sama multiaktor, efektivitasnya tetap terhambat oleh dominasi kepentingan ekonomi dan kebijakan negara yang mengabaikan keberlanjutan lingkungan.²⁵

Karya ini relevan bagi penelitian tentang internasionalisasi isu deforestasi hutan Papua melalui kampanye Greenpeace karena memberikan kerangka analitis mengenai peran dan keterbatasan Greenpeace sebagai aktor non-negara dalam menghadapi kekuasaan negara dan korporasi. Dalam penelitian yang penulis lakukan, karya ini dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana Greenpeace menginternasionalisasikan isu deforestasi sebagai metode merespons kebijakan domestik dan kepentingan ekonomi yang kuat, sekaligus menjelaskan tantangan struktural yang membatasi dampak kampanye tersebut. Dengan demikian, karya ini membantu penulis menganalisis posisi Greenpeace dalam relasi antara negara, korporasi, dan masyarakat sipil global.

Kelima, penulis merujuk artikel *Peran Greenpeace Indonesia dalam Melindungi Lembah Grime Nawa dari Deforestasi di Papua* karya Rahman dkk. Artikel ini menganalisis bagaimana Greenpeace berperan dalam upaya pelestarian Lembah Grime Nawa terhadap ancaman deforestasi di Papua. Penelitian ini menunjukkan bahwa ancaman terhadap hutan di Lembah Grime Nawa tidak hanya

²⁵ Najamuddin Khairur Rijal dan Uswatun Hasanah, "Global Civil Society Vis-a-Vis State and Corporation: The Challenges of Greenpeace in Reducing Deforestation in Brazil," dalam *Environmental Issues and Social Inclusion in a Sustainable Era*, 1 ed. (Routledge, 2023), <https://doi.org/10.1201/9781003360483>.

berasal dari perluasan perkebunan sawit dan ekstraktif, tetapi juga dari lemahnya perlindungan hukum terhadap hutan adat dan kurangnya partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan.²⁶ Greenpeace berupaya melalui investigasi lapangan, kampanye publik, dan advokasi terhadap pemerintah serta aktor terkait untuk mempertahankan status hutan serta ruang hidup masyarakat adat setempat.

Kajian ini relevan bagi penulis dengan penjelasan bagaimana Greenpeace bekerja di tingkat lokal untuk menghadapi deforestasi dan memperjuangkan hak masyarakat adat sebagai bagian dari kampanyenya. Artikel ini menekankan peran strategis organisasi lingkungan dalam memperjuangkan kelestarian ekosistem dan hak masyarakat adat Papua di tengah tekanan ekonomi dan kebijakan pembangunan yang merugikan. Pemahaman tentang langkah-langkah kampanye Greenpeace di Lembah Grime Nawa memberikan gambaran empiris yang kuat tentang mekanisme advokasi yang bisa menghubungkan isu lokal dengan perhatian global melalui media, jejaring internasional, dan tekanan opini publik.

1.7 Kerangka Konseptual

Dalam sebuah penelitian, kerangka konseptual menjadi alat yang penting dalam menganalisis permasalahan dan menjawab pertanyaan penelitian. Dengan demikian, penulis menggunakan konsep *Pathway of Transnational Activism* dalam melakukan penelitian ini. Konsep ini relevan dan penting dalam menjawab penelitian terkait kampanye Greenpeace di Papua yang penulis lakukan.

²⁶ Bimo Agung Wibowo Rahman dkk., “Peran Greenpeace Indonesia Dalam Melindungi Lembah Grime Nawa Dari Deforestasi Di Papua,” *Indonesian Journal of Peace and Security Studies (IJPSS)* 5, no. 2 (2023): 91–114, <https://doi.org/10.29303/ijpss.v5i2.130>.

1.7.1 Pathway of Transnational Activism

Dengan dinamika politik internasional saat ini, studi terkait aktivisme transnasional menjadi bagian penting dalam studi hubungan internasional, terlebih dengan globalisasi yang meningkatkan intensitas interaksi aktivisme dan advokasi yang bersifat lintas batas negara. Sejumlah literatur telah berupaya menjelaskan perkembangan dan dampak aktivisme transnasional. Meskipun demikian, dibutuhkan penjelasan terkait kompleksitas interaksi aktivisme transnasional dengan berbagai aktor hubungan internasional, seperti *intergovernmental organization*, pemerintahan negara, hingga *civil society* dalam sebuah negara. Aktivisme transnasional masa kini tidak lagi berjalan melalui gerakan tunggal. Oleh karena itu, sebuah kampanye aktivisme transnasional tidak lagi hanya mengandalkan intensitas mobilisasi kampanye, melainkan juga kemampuan aktor aktivisme transnasional menavigasi dan memanfaatkan jalur-jalur *influence* yang tersedia.

Konsep *Pathway of Transnational Activism* digunakan untuk menjelaskan jalur-jalur yang digunakan oleh aktor aktivisme transnasional dalam mencapai pengaruh yang lebih luas dalam memperjuangkan isu-isu tertentu. Keck dan Sikkink menjelaskan aktor-aktor yang terlibat dalam sebuah advokasi dan aktivisme transnasional dapat meliputi *Non-Governmental Organization* (NGO), komunitas sosial dan akademik, lembaga keagamaan, media, perserikatan, hingga pemerintah sebuah negara dan *intergovernmental organizations*.²⁷ Dalam publikasinya, Keck dan Sikkink menjelaskan aktor-aktor advokasi dan aktivisme transnasional pada umumnya membentuk jaringan berdasarkan kepentingan yang

²⁷ Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink, *Transnational Advocacy Networks in International and Regional Politics*, 1999.

sama untuk menembus kedaulatan negara. Aktor-aktor tersebut terlibat dalam jaringan advokasi didasari motif mendorong sebuah gerakan tertentu, bahkan mendorong perubahan kebijakan dengan dilandasi gagasan serta norma yang dinilai lebih ideal. Aktor-aktor dalam jaringan advokasi transnasional terjalin dalam hubungan horizontal.

Zajak dalam publikasinya yang berjudul *Pathway of Transnational Activism: A conceptual framework* mengkritik penjelasan Keck dan Sikkink yang dinilai terlalu sempit dalam menjelaskan alur kerja aktivisme transnasional. Dalam konsep TANS, aktivisme transnasional diasumsikan pada dua klasifikasi.²⁸ Pertama, aktor domestik dapat menyampaikan klaimnya, membentuk aliansi, dan menggerakkan sumber daya internasional. Kedua, negara yang menjadi target gerakan aktivisme berada dalam posisi rentan atas tekanan luar negeri yang dapat digerakkan jaringan advokasi. Atas dasar kedua asumsi tersebut, Zajak menilai konsep yang diberikan oleh Keck dan Sikkink terlalu sempit, terlebih pada kasus gerakan aktivisme transnasional yang menargetkan negara-negara yang tidak rentan atas tuduhan/tuntutan internasional, atau tidak terdapat aktor domestik yang cukup mampu untuk menyuarakan isunya di level transnasional.

Dalam argumentasinya, Zajak menggunakan definisi aktivisme sebagai aktivitas politik yang didasari konflik kepentingan, kontradiksi atas struktur politik yang berkuasa, dan dilakukan dari luar lembaga politik formal.²⁹ Zajak menilai diperlukan perspektif untuk menganalisis aktivisme transnasional dalam situasi yang lebih beragam. Sebagai contoh, ketika rezim di negara yang menjadi target

²⁸ Sabrina Zajak, "Pathways of Transnational Activism: A Conceptual Framework," *MPIfG Discussion Paper No. 14/5*, 2014.

²⁹ Zajak, "Pathways of Transnational Activism: A Conceptual Framework."

gerakan aktivisme mampu meredam aktivisme di level domestik, dan dalam situasi negara yang menjadi target gerakan aktivisme mampu menghalau atau tidak rentan terhadap tekanan internasional.

Dalam buku “Rethinking Pathways of Transnational Activism”, Zajak mengintegrasikan dua aspek utama dalam meneliti jalur-jalur pengaruh aktivisme transnasional,³⁰ yaitu berbagai badan peraturan yang saling berdampingan dengan karakteristik tata kelola, perangkat aturan, hingga keterlibatan aktor-aktor di dalamnya. Aspek kedua adalah jaringan spesifik antara berbagai institusi tersebut dengan konteks domestik. Menurut Zajak, kedua aspek tersebut menjadi aspek penting untuk bisa melihat pergerakan transnasional secara keseluruhan, baik dengan pencapaiannya kepentingannya di level transnasional sebagai target terdekat, dan perubahan di level domestik sebagai target utama.

Bagi sebuah gerakan aktivisme transnasional dapat memengaruhi kebijakan sebuah negara, terdapat beberapa jalur pengaruh yang dapat digunakan. Dalam analisis Bernstein dan Cashore diidentifikasi empat jalur internasionalisasi, yaitu ketergantungan pasar, peraturan internasional, diskursus normatif internasional, dan infiltrasi atas proses pembuatan kebijakan.³¹ Dari keempat jalur internasionalisasi, Bernstein dan Cashore mengidentifikasi ketiga jalur pertama sebagai jalur yang secara eksplisit berhadapan dengan otonomi negara. Di lain sisi, jalur keempat, yaitu infiltrasi proses pembuatan kebijakan dilakukan tidak secara langsung

³⁰ Zajak, “Rethinking Pathways of Transnational Activism.”

³¹ Steven Bernstein dan Benjamin Cashore, “Globalization, Four Paths of Internationalization and Domestic Policy Change: The Case of EcoForestry in British Columbia, Canada,” *Canadian Journal of Political Science / Revue canadienne de science politique* 33, no. 1 (2000): 67–99.

menantang otoritas negara, melainkan memanfaatkan “*policy network*” melalui kerja sama dengan aktor domestik yang memiliki kesamaan kepentingan.³²

Dengan didasari oleh analisis Bernstein dan Cashore, Zajak mengidentifikasi empat jalur yang digunakan dalam aktivisme transnasional yaitu *international-organizational pathway*, *bilateral pathway*, *market pathway*, dan *civil society pathway*.³³ Zajak menekankan bahwa keempat jalur tersebut tidak bersifat hierarkis maupun eksklusif, melainkan dapat dijalankan secara paralel dan saling melengkapi bergantung pada konteks politik, ekonomi, dan sosial yang dihadapi oleh aktor aktivisme transnasional. Secara rinci, Zajak menjelaskan keempat jalur dalam aktivisme transnasional sebagai berikut.³⁴

1. *International-organizational pathway* merupakan jalur yang bekerja melalui institusi dan forum internasional, seperti *intergovernmental organization* dan rezim multilateral, untuk menekan negara target agar mengubah kebijakannya. Jalur ini efektif ketika negara target memiliki kerentanan atas reputasinya di level internasional, sehingga tekanan melalui norma dan mekanisme institusi global dapat mendorong perubahan perilaku di level domestik.
2. *Bilateral pathway* memanfaatkan relasi antarnegara sebagai instrumen tekanan, di mana aktor aktivisme berupaya melibatkan pemerintah negara lain untuk menyuarakan tuntutan kepada negara sasaran kampanye. Efektivitas jalur ini sangat bergantung pada seberapa besar

³² Bernstein dan Cashore, “Globalization, Four Paths of Internationalization and Domestic Policy Change.”

³³ Zajak, “Rethinking Pathways of Transnational Activism.”

³⁴ Zajak, “Pathways of Transnational Activism: A Conceptual Framework.”

ketergantungan politik dan ekonomi negara target terhadap negara yang diajak memberikan tekanan tersebut.

3. *Market pathway* menjadikan aktor-aktor ekonomi seperti perusahaan transnasional, rantai pasok global, dan konsumen internasional sebagai target tekanan, melalui strategi seperti kampanye boikot hingga penggalangan dukungan konsumen global terhadap produk yang terkait dengan industri yang dinilai melanggar dalam kampanye aktivisme terkait. Jalur ini mengkaji bagaimana tingkat kekuatan ekonomi sebuah negara dapat memengaruhi efektivitas aktivisme transnational.
4. *Civil society pathway* berfokus pada pembangunan koalisi dengan aktor masyarakat sipil di dalam negara target, seperti organisasi lokal, media, dan kelompok masyarakat adat, untuk menciptakan tekanan dari dalam terhadap pemerintah.

Table 1.1 Indikator Jalur-jalur Aktivisme Transnasional

Jalur Aktivisme	Indikator
International-organizational Pathway	Melibatkan organisasi internasional, regional, rezim multilateral.
Bilateral Pathway	Melibatkan aktor negara, lembaga politik negara, lembaga supranasional.
Market Pathway	Melibatkan aktor usaha, serikat usaha, lembaga sertifikasi, konsumen.
Civil Society Pathway	Melibatkan aktor masyarakat sipil, lembaga masyarakat, media massa, <i>non-governmental organization</i> , komunitas masyarakat adat.

Sumber: Diolah oleh peneliti

Konsep *Pathway of Transnational Activism* memungkinkan analisis terhadap relasi aktivisme transnasional terhadap aktor-aktor domestik hingga

lembaga transnasional yang dinamis. Dengan mengkaji aktivisme di berbagai jalur, kerangka kerja ini memungkinkan penelitian untuk menganalisis efek dari intervensi aktivis hingga relasi institusional. Konsep yang dikembangkan oleh Zajack ini juga berkontribusi memberikan analisis bagaimana kampanye aktivisme transnasional kemudian dapat berjalan berdasarkan kondisi negara target, baik berdasarkan aspek politik hingga ekonominya.

1.8 Metodologi Penelitian

Dalam melakukan penelitian pada rumpun hubungan internasional, metodologi penelitian menjadi aspek penting untuk untuk mengolah dan menginterpretasikan data dan fenomena yang diteliti.³⁵ Dalam penelitian yang penulis lakukan, penulis menggunakan tipe penelitian kualitatif deskriptif. Siyoto dan Sodik menjelaskan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang melihat fenomena penelitian secara mendalam untuk memahami keunikan yang ada dalam individu objek penelitian.³⁶ Dengan demikian, penulis berupaya memberikan penjelasan yang sistematis dan menyeluruh tanpa menggeneralisir objek dalam penelitian.

1.8.1 Jenis Penelitian

Dalam menyusun penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif diartikan sebagai penelitian yang dilakukan dengan investigasi intensif terhadap objek penelitian untuk memahami karakteristik keunikan dari objek penelitian.³⁷ Metode kualitatif bertujuan untuk menghasilkan penelitian yang

³⁵ Mohtar Mas'ud, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi* (LP3ES, 1990).

³⁶ Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Literasi Media Publishing, 2015).

³⁷ Matthew B. Miles dkk., *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, Edition 3 (Sage, 2014).

sistemik, menyeluruh, dan terpadu, atau dengan kata lain memberikan gambaran yang bersifat holistik. Penulis menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dalam penelitian ini. Melalui penelitian kualitatif deskriptif, penulis mendeskripsikan hubungan antarvariabel melalui perilaku atau tindakan aktor. Penelitian dengan metode ini dilakukan penulis agar dapat menggambarkan bagaimana Greenpeace sebagai aktor aktivisme lingkungan internasional melakukan kampanye untuk isu deforestasi hutan hujan di Papua.

1.8.2 Batasan Penelitian

Untuk memastikan penelitian berada pada koridor yang tepat, penulis menetapkan batasan penelitian dari periode tahun 2005-2025. Periode tahun 2005 diambil sebagai awal periode penelitian karena pada masa ini Greenpeace mulai melakukan kampanye intensif di Papua, khususnya terhadap isu deforestasi dan masyarakat adat. Periode 2025 menjadi batas akhir penelitian karena masa ini menandai dua dekade Greenpeace menjalankan kampanye di Papua tersebut. Dalam rentang periode tersebut juga terjadi sejumlah kejadian penting. Misalnya, dalam periode tersebut Greenpeace secara intens mengadvokasikan pendaftaran sejumlah kawasan hutan adat, hingga mengampanyekan isu penambangan di Raja Ampat.

1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis

Unit analisis dipahami sebagai variabel penelitian yang perilakunya akan dianalisis oleh penulis dalam penelitiannya.³⁸ Dalam penelitian ini variabel yang menjadi unit analisis adalah Greenpeace dengan berfokus pada kampanye yang dilakukan Greenpeace di Papua. Selain unit analisis, terdapat unit eksplanasi, yaitu

³⁸ Mas'ud, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*.

variabel yang berdampak kepada unit analisis. Unit eksplanasi dalam penelitian ini adalah tata kelola hutan oleh Indonesia pada kasus hutan hujan Papua. Kemudian tingkat analisis pada penelitian ini adalah di tingkat kelompok negara. Tingkat kelompok negara dipilih sebagai tingkat analisis dalam penelitian ini karena tindakan perilaku Greenpeace dalam kampanyenya dijalankan di berbagai negara yang menjadi basis Greenpeace. Selain itu, kampanye yang dijalankan Greenpeace juga berpotensi atau sudah memengaruhi sejumlah negara yang memiliki kepentingan terhadap isu lingkungan.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari sumber primer dan sekunder. Data primer merupakan data atau informasi yang didapatkan secara langsung dari individu/objek atau situasi yang diteliti.³⁹ Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan Greenpeace serta analisis terhadap dokumen dan materi kampanye berupa *press release* dan video yang dipublikasikan oleh Greenpeace, dan juga wawancara dengan kelompok masyarakat dari Papua. Selain sumber tersebut, peneliti juga menggunakan sumber sosial media dari tokoh atau kelompok yang peneliti kaji, seperti unggahan berisi pernyataan *campaigner* Greenpeace, dan juga kutipan unggahan YouTube dari *campaigner* ataupun tokoh tertentu lainnya.

Data sekunder merupakan data yang didapatkan oleh peneliti secara tidak langsung, atau didapat dari tangan kedua.⁴⁰ Data sekunder berupa olahan informasi yang kemudian digunakan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, data sekunder

³⁹ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 3 ed. (SAGE Publications, Inc., 2009).

⁴⁰ Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*.

diperoleh melalui proses studi pustaka dari sumber-sumber seperti jurnal, buku, dan artikel *website* relevan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini penulis akan berfokus pada sumber wawancara dengan aktor langsung, jurnal ilmiah, dan publikasi data dan kampanye dari sejumlah situs resmi jaringan advokasi yang terkait dengan kampanye Greenpeace di Papua.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Alur analisis data dalam penelitian kualitatif menurut Miles *dkk.* dapat terbagi menjadi tiga proses:⁴¹

1. pemadatan data, yaitu tahap menyeleksi dan abstraksi beragam data yang didapatkan dalam proses penelitian, proses ini menurut Miles *dkk.* dilakukan untuk memperkuat data yang digunakan dalam penelitian dan sudah terjadi sebelum data benar-benar dikumpulkan;
2. penyajian data, yaitu bentuk mengorganisir data yang telah diseleksi untuk kemudian ditampilkan dalam penelitian berdasarkan hasil analisis peneliti agar dapat menghasilkan kesimpulan penelitian;
3. dan penarikan dan verifikasi kesimpulan, yaitu tahapan setelah peneliti menginterpretasi data yang digunakan berdasarkan pola, penjelasan, atau ungkapan yang didapatkan oleh peneliti.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan tahap pertama dengan menyeleksi data yang diterima berdasarkan relevansi terhadap laju deforestasi Papua, kampanye hutan Greenpeace, dan jaringan advokasi terkait deforestasi Papua. Selanjutnya, penulis menguraikan data yang diambil untuk menjawab pertanyaan penelitian, yaitu terkait strategi Greenpeace mengampanyekan isu deforestasi hutan

⁴¹ Miles *dkk.*, *Qualitative Data Analysis*.

hujan Papua dalam perspektif konsep *Pathway of Transnational Activism*. Terakhir, penulis menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah diinterpretasikan penulis pada tahapan sebelumnya.

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini, penulis menyajikan latar belakang masalah, pertanyaan penelitian, manfaat penelitian, interpretasi studi pustaka, kerangka konseptual yang menjadi alat analisis penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II Sejarah dan Dinamika Greenpeace

Pada bab ini, penulis akan memberikan penjelasan profil Greenpeace, bagaimana Greenpeace dikategorikan sebagai *International Non-Governmental Organization*, Greenpeace, dan aktivisme yang dilakukan oleh Greenpeace. Bab ini juga akan menjelaskan bagaimana Greenpeace terlibat dalam jaringan advokasi di Indonesia dan internasional.

BAB III Deforestasi Hutan Hujan Papua

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan bagaimana kondisi deforestasi hutan hujan Papua, dan langkah yang dilakukan oleh pihak yang berkepentingan. Dalam bab ini penulis akan memberikan gambaran bagaimana dampak deforestasi hutan hujan Papua terhadap krisis iklim.

BAB IV Analisis Jalur Kampanye Greenpeace Mengangkat Isu Deforestasi Papua ke Kancah Internasional

Dalam bab ini, penulis akan memberikan penjelasan terkait lini kampanye hutan Greenpeace. Bab ini juga akan membahas analisis metode kampanye Greenpeace dalam mengampanyekan isu deforestasi hutan hujan Papua melalui teori *Pathway of Transnational Activism* oleh Zajak.

BAB V Penutup

Pada bab ini, penulis menyajikan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan saran mengenai masalah pada penelitian.

